KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan I

2020

Penyusun:
Penanggung Jawab: Arif Wibawa I Ketua Tim: Eko Wahyu Budi Utomo I
Editor: Eko Wahyu Budi Utomo I Desain Grafis: Agustina Diprianti
Anggota: Rachmadi Wahyu P S I Afif Efendi I Zamrud Siswa Utama I
Novianti Panggalo I Tasliun I Agustina Diprianti I

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi Sulawesi Tenggara
"Mengawal APBN Indonesia Maju"

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I 2020 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2020, perekonomian Indonesia dan dunia mendapat tantangan berupa jatuhnya harga minyak dunia dan pandemi COVID-19. Jatuhnya harga minyak berpengaruh pada penurunan pendapatan namun dikompensasi dengan turunnya belanja subsidi untuk jenis BBM tertentu dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menambah cadangan BBM.

Tidak seperti krisis moneter 1998 dan 2008, pandemi COVID-19 akan memberikan dampak yang lebih besar karena menyebabkan terganggunya aktivitas produksi dan juga menurunkan daya beli masyarakat. COVID-19 yang menjadi pandemi dunia, juga menyebabkan penurunan ekspor Indonesia.

Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi diantisipasi pemerintah dengan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun, yang dialokasikan untuk penanganan kesehatan, penambahan *social safety net*, dan dukungan industri. Kebijakan ini ditujukan untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat yang menjadi penggerak utama perekonomian.

Pada triwulan I 2020, dampak jatuhnya harga minyak dunia dan pandemi COVID-19 mulai dirasakan Sultra. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 turun menjadi 4,37% dari sebelumnya 6,39%, kinerja ekspor Sultra turun sebesar 90,80% dan mengakibatkan penambahan angka pengangguran menjadi 3,17%. Di sisi fiskal, secara konsolidasian, pendapatan lingkup Sultra turun 37,64% begitupun belanja turun 10,49% dibanding triwulan I 2019.

Kedepan, turbulensi perekonomian akibat pandemi COVID-19 akan lebih terasa. Pemda perlu mengambil langkah nyata menangani pandemi COVID-19, melakukan realokasi APBD, menyiapkan bantuan bagi masyarakat terdampak, dan memulihkan ekonomi. Ditengah itu semua, Sultra memiliki 2 keunggulan. Peluang meningkatkan ekspor menyusul redanya kasus COVID di Tiongkok dan potensi pertanian dan perikanan yang tinggi untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan pangan sebagaimana perkiraan FAO. Diharapkan langkah yang telah diambil, dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampaknya bagi perekonomian Sultra.

Kendari, 8 Mei 2020,
Kepala Kantor Wilayah,

Arif Wibawa

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL IV
DAFTAR GRAFIK V
DAFTAR LAMPIRAN VI
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1
1.1.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha 1
1.1.2 PDRB Berdasarkan Pengeluaran 2
1.2 INFLASI 3
1.3 INDIKATOR KESEJAHTERAAAN 3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 5
2.1 PENDAPATAN NEGARA 5
2.1.1 Penerimaan Perpajakan 5
2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6
2.2 BELANJA NEGARA 7
2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat K/L 7
2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 8
2.2.3 Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) 8
2.2.4 Manajemen Investasi Pusat 10
2.3 PROGNOSIS REALISASI APBN 10
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 11
3.1 PENDAPATAN DAERAH 11
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah 11
3.1.2 Pendapatan Transfer 12
3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 13

3.2 BELANJA DAERAH 13
3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 13
3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan 14
3.3 PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2020 . 14
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 15
4.1 ANALISIS PROPORSI DAN PERBANDINGAN..... 15
4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN..... 15
4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan..... 15
4.2.2 Analisis Perubahan 16
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian 17
4.3 BELANJA KONSOLIDASIAN 17
4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan..... 17
4.3.2 Analisis Perubahan 17
4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional 18
4.4 ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 18
BAB V BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 20
5.1 KINERJA FISKAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 20
5.2 TRANSFORMASI UMKM MENUJU TEKNOLOGI DIGITAL 24
LAMPIRAN 26
DAFTAR PUSTAKA 29
FOTO SAMPUL 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Kegiatan Utama 4
Tabel 2. 1 Pagu dan Realisasi APBN lingkup Sultra (miliar Rp.) 5
Tabel 2. 2 Ekuitas BLU lingkup Sultra (miliar) 9
Tabel 2. 3 Pagu RM dan PNBP BLU lingkup Sultra (miliar) 9
Tabel 2. 4 Penyaluran KUR per Skema lingkup Sultra 10
Tabel 2. 5 Prognosis Realisasi APBN lingkup Sultra tahun 2020 10
Tabel 3. 1 Pagu dan Realisasi APBD s.d Triwulan I 2019 dan 2020 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp.) 11
Tabel 3. 2 Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV 2020 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah) 14
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020 15
Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dan 2020 17
Tabel 4. 3 Ringkasan LO Pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020 19
Tabel 5. 1 Tambahan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 21
Tabel 5. 2 Anggaran Penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara 22
Tabel 5. 3 Perbandingan Penyaluran APBN Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2020 Berdasarkan KPPN 23
Tabel 5. 4 Pembiayaan KUR dan UMi Triwulan I 2020 24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2020 2
Grafik 1. 2 Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I 2020 2
Grafik 1. 3 Inflasi di Sultra dan Nasional Tahun 2020 (%) 3
Grafik 2. 1 Realisasi Perpajakan Triwulan I 2020 (miliar) 6
Grafik 2. 2 Realisasi PNBP Triwulan I 2020 (miliar) 6
Grafik 2. 3 Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat K/L Triwulan I 2020 (miliar)..... 7
Grafik 2. 4 Realisasi TKDD Triwulan I 2020 (miliar) 8
Grafik 3.1 Target Dan Realisasi Per Jenis PAD s.d Triwulan I 2020 Seluruh Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah) ……..…….....12
Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Transfer s.d Triwulan I Tahun 2020 Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah) 13
Grafik 3. 3 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d Triwulan I 2020 (miliar rupiah)..... 13
Grafik 3. 4 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal s.d Triwulan I 2020 Lingkup Provinsi Sultra (miliar rupiah)..... 13
Grafik 3. 5 Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Urusan s.d Triwulan I 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah)..... 14
Grafik 4. 1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020..... 16
Grafik 4. 2 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat Dan Daerah 16
Grafik 4. 3 Perbandingan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian 16
Grafik 4. 4 Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja 17
Grafik 4. 5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020 17
Grafik 4. 6 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2019 18
Grafik 5. 1 Perbandingan Persentase Realisasi Kumulatif Harian Belanja APBN Tahun 2019 dan 2020 22
Grafik 5. 2 Perbandingan Persentase Realisasi Kumulatif Harian Dana Desa Tahap I Tahun 2019 dan 2020..... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Inflasi di Wilayah Sulawesi 26

Lampiran 2 Realisasi APBN Lingkup Sultra Per Fungsi di Luar TKDD 26

Lampiran 3 Penyaluran KUR Dan UMi Lingkup Sultra 27

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan Ekonomi
4,37%

Pertumbuhan Sektoral TW I 2020:
1. Jasa Keuangan dan Kegiatan Sosial (9,67%)
2. Jasa Keuangan dan Asuransi (8,86%)
3. Industri Pengolahan (8,70%)

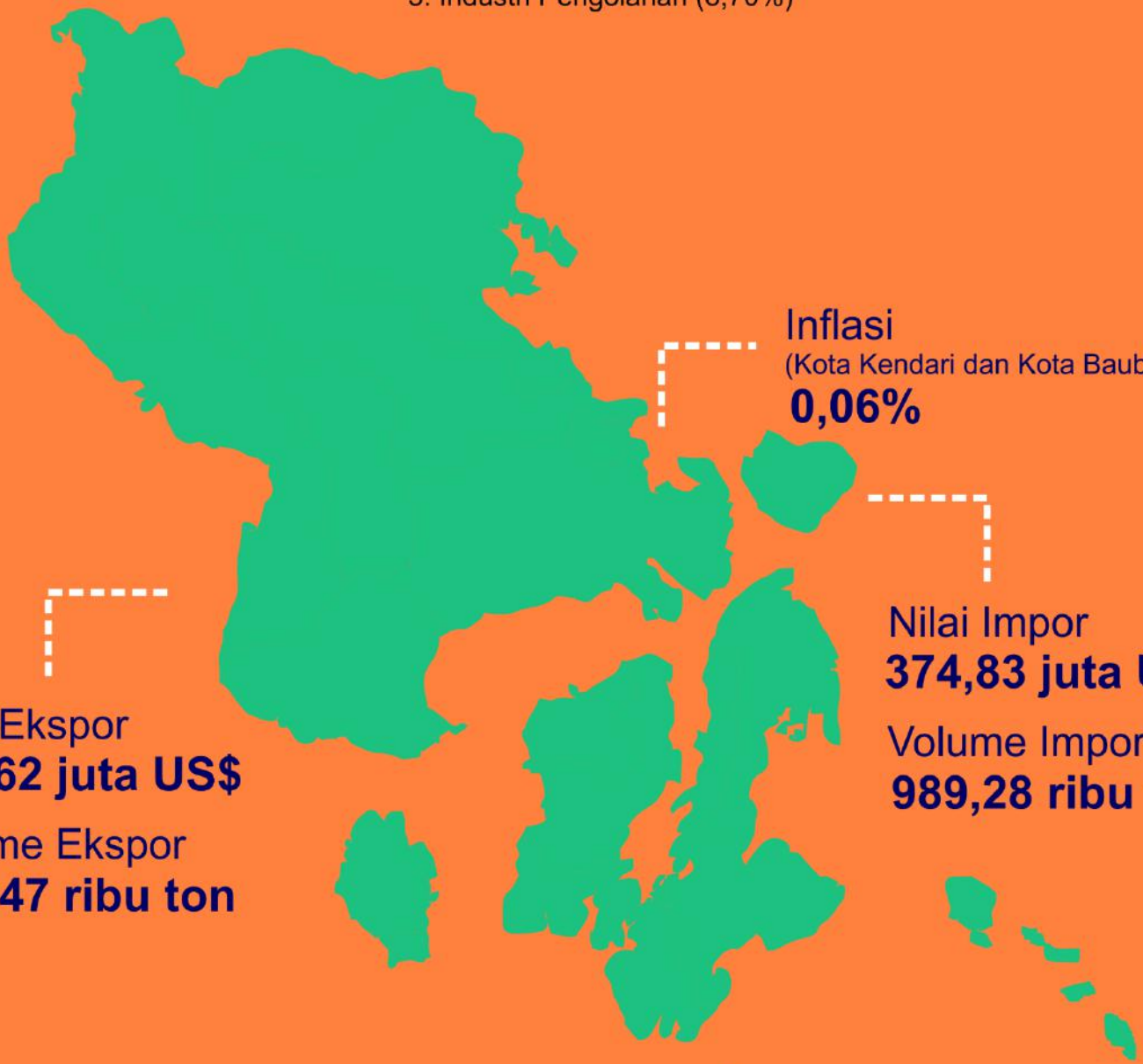

Inflasi
(Kota Kendari dan Kota Baubau)
0,06%

Nilai Impor
374,83 juta US$

Volume Impor
989,28 ribu ton

Nilai Ekspor
416,62 juta US$

Volume Ekspor
298,47 ribu ton

Tingkat Pengangguran Terbuka
3,17%

Sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja

BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pada triwulan I 2020, perkembangan ekonomi global bergerak sangat dinamis. Meskipun tensi perang dagang Amerika dan Tiongkok telah sedikit mereda, terdapat situasi baru yang berdampak pada kinerja perekonomian dunia. Pertama, jatuhnya harga minyak dunia yang dipicu tidak tercapainya kesepakatan kuota produksi negara-negara anggota OPEC, dapat berakibat pada turunnya biaya produksi dan juga mengurangi nilai ekspor bagi produsen minyak. Kedua, wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi dapat mempengaruhi nilai perdagangan internasional dan pada akhirnya mengancam perekonomian dalam negeri.

1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pada triwulan I 2020, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mengalami perlambatan. Bila pada triwulan I 2019 pertumbuhan ekonomi (YoY) ekonomi Sultra tumbuh 6,39%, pada triwulan I 2020 ekonomi hanya tumbuh 4,37%. Perlambatan pertumbuhan berlangsung secara nasional. Pertumbuhan secara nasional pada triwulan I 2020, sebesar 2,97% turun 2,1 poin dibanding 2019. Di wilayah Sulawesi, rata-rata pertumbuhan PDRB Triwulan I 2020 sebesar 3,83%. Perlambatan terparah dialami oleh Sulsel dengan penurunan sebesar 3,51 poin dari 6,58% (2019) menjadi 3,07% (2020) sedangkan perlambatan yang ringan dialami perekonomian Sulbar. Ringannya perlambatan ekonomi Sulbar, menempatkan perekonomian Sulbar tumbuh paling tinggi (4,92%), disusul Sulteng (4,91%), dan Sultra (4,37%).

1.1.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB Sultra triwulan I 2020 sebesar Rp31,55 trilun (ADHB) atau sebesar Rp22,76 (ADHK). Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan triwulan I (YoY) terjadi pada seluruh sektor (**Grafik 1.1**). Penggerak utama pertumbuan Sultra berasal dari jasa keuangan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 9,67% yang disebabkan meningkatnya jumlah pasien dan sarana kesehatan imbas pandemi COVID-19. Sektor lain yang juga tumbuh signifikan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi (8,86%), dan industri pengolahan (8,70%). Kontributor utama PDRB Sultra masih tetap bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,02% disusul usaha Pertambangan dan Penggalian (20,54%), dan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,57%).

Grafik 1. 1
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha TW I 2020

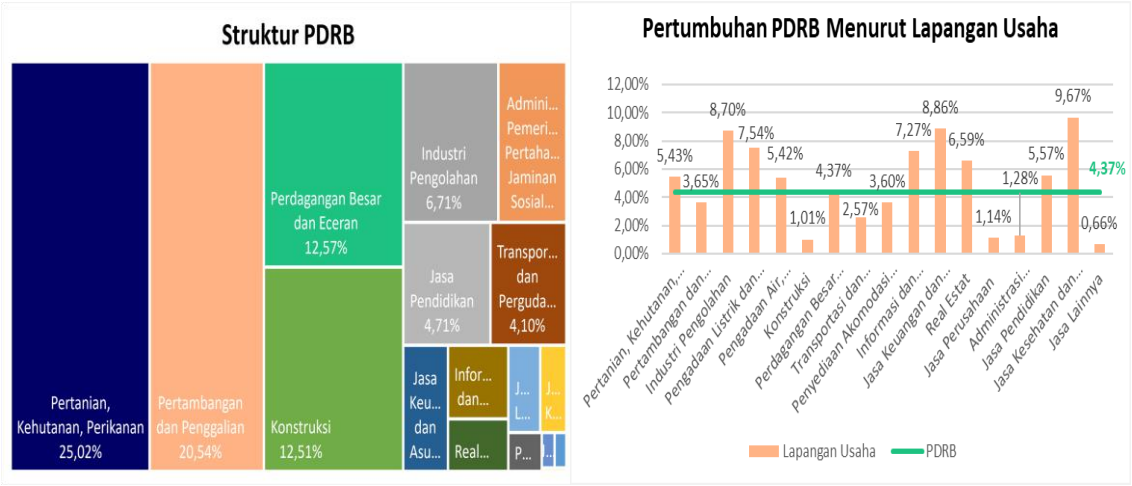

Sumber:BPS, 2020 (diolah)

Bila dibandingkan dengan triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 8,18%. Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar kontraksi ekonomi triwulan I 2020 dengan pertumbuhan minus 18,71%. Kondisi ini berhubungan erat dengan pola belanja pemerintah, khususnya belanja modal yang terkonsentrasi di akhir tahun anggaran untuk menyelesaikan proyek-proyek konstruksi.

1.1.2 PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Grafik 1. 2
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Pengeluaran TW I 2020

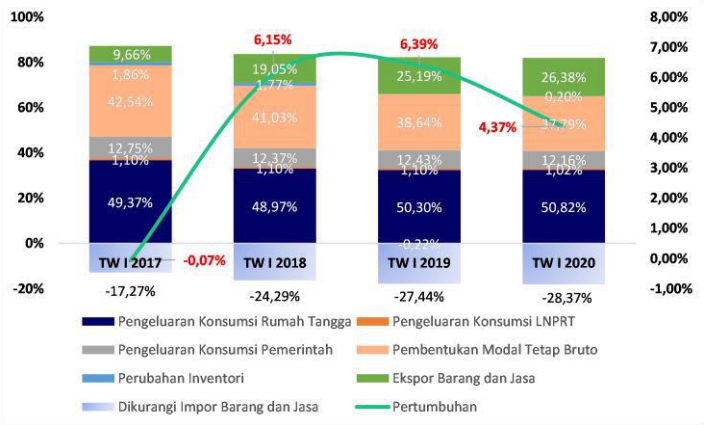

Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi (YoY) Sultra masih digerakkan oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa tumbuh 25,88% dengan kontribusi sebesar 26,38%. Struktur perekonomian Sultra masih sangat bergantung pada pengeluaran rumah tangga yang memberikan andil 50,82% dari PDRB.

Meskipun secara regional perdagangan Sultra pada triwulan I 2020 tumbuh 25,88% namun volume ekspor luar negeri Sultra mengalami kontraksi yang dalam sebesar 90,80%, melebihi perlambatan ekspor nasional sebesar 4,23%. Namun dari sisi nilai, masih tertolong pelemahan rupiah sehingga nilai ekspor tetap tumbuh 22,97%. Hal ini

sangat berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama di Tiongkok sebagai tujuan utama ekspor Sultra (89,05%). Perkembangan ekspor luar negeri Bulan Maret 2020, menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan volume ekspor sebesar 55,09% dibanding Februari 2020, menyusul meredanya kasus COVID-19 di Tiongkok.

1.2 Inflasi

Perkembangan Inflasi Sultra yang diwakili inflasi Kota Kendari dan Inflasi Kota Baubau selama triwulan I 2020 berada dibawah inflasi gabungan nasional (**Grafik 1.3**). Pada bulan Januari 2020, terjadi deflasi di Sultra yang disebabkan penurunan harga komoditas transportasi di Kota Kendari (3,34%), dan penurunan harga perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga di Kota Baubau sebesar 27,74%. Pada Bulan Maret 2020, baik di Kota Kendari maupun Kota Baubau, tingkat inflasi tercatat sebesar 0.06%. Inflasi di Kendari didorong oleh peningkatan harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (1,72%), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,49%). Sementara inflasi di Kota Baubau disebabkan peningkatan harga bahan makanan (0,43%), kelompok Kesehatan (1,28%) dan perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,62%). Pada Bulan Maret 2020, dari 13 Kota di Sulawesi yang disurvei, inflasi di Sultra menempati urutan ke 4 dari 6 kota yang mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Mamuju Sulawesi Barat sebesar 0,62% dan deflasi paling dalam terjadi di Manado Sulawesi Utara 0,90% (**Lampiran I**).

Grafik 1. 3
Inflasi di Sultra dan Nasional Tahun 2020 (%)

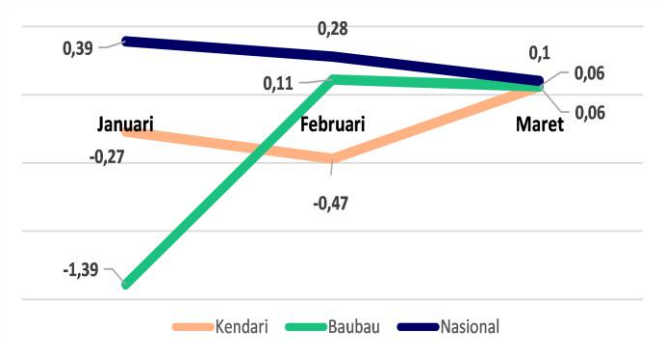

Sumber: BPS, 2020 (diolah)

1.3 Indikator Kesejahteraaan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas ekonomi yang didalamnya terdiri atas komponen sumber daya manusia dan modal. Di bidang ketenagakerjaan, kondisi ketenagakerjaan jumlah penduduk usia kerja mencapai 1,8 juta jiwa meningkat 2,32% dibanding 2019, sementara jumlah angkatan kerja Sultra per Februari 2020 meningkat 1,49% (**Tabel 1.1**). Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sultra mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir khususnya penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki. Peningkatan penduduk bukan angkatan

kerja melampaui peningkatan jumlah angkatan kerja (4,42%). Hal ini disebabkan peningkatan penduduk usia kerja yang lebih memilih untuk mengurus rumah tangga.

Tabel 1. 1
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Kegiatan Utama

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Feb 2019 - Feb 2020		Feb 2018 - Feb 2020	
				Orang	Persen	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	1.768.949	1.810.345	1.852.420	42.075	2,32%	83.471	4,72%
Angkatan Kerja	1.286.623	1.296.494	1.315.839	19.345	1,49%	29.216	2,27%
Bekerja	1.250.729	1.258.102	1.274.067	15.965	1,27%	23.338	1,87%
Pengangguran	35.894	38.392	41.772	3.380	8,80%	5.878	16,38%
Bukan Angkatan Kerja	482.326	513.851	536.581	22.730	4,42%	54.255	11,25%
Sekolah	158.693	167.054	171.664	4.610	2,76%	12.971	8,17%
Mengurus Rumah Tangga	281.595	298.083	313.524	15.441	5,18%	31.929	11,34%
Lainnya	42.038	48.714	51.393	2.679	5,50%	9.355	22,25%

Sumber: BPS, 2020

Satu persen pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 mampu menyerap tenaga kerja 3.653 jiwa, lebih banyak dibandingkan triwulan I 2019 yang hanya mampu menyerap 1.154 angkatan kerja. Namun demikian daya serap perekonomian tidak sebanding dengan penambahan angkatan kerja, menyebabkan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,21 poin dibanding 2019 menjadi 3,17% di Februari 2020. Sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan mengalami peningkatan daya serap sejalan dengan tumbuhnya pendapatan sektoral. Namun disisi lain jumlah tenaga kerja di sektor Kesehatan yang mengalami pertumbuhan sektoral paling tinggi justru mengalami penurunan.

Pada Februari 2020, terjadi peningkatan penduduk bekerja yang berasal dari lulusan SMK sebanyak 14,12% sementara jumlah penduduk bekerja dari lulusan Diploma turun 20,57%, menyebabkan peningkatan TPT lulusan Diploma menjadi 7,66% dimana sebelumnya hanya 3,55%. Kondisi ini dapat disebabkan karena pemberi kerja membutuhkan keterampilan teknis dasar (kasar) dengan upah yang rendah sementara itu karekateristik pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang memilki keterampilan teknis namun memiliki standar penghasilan yang lebih tinggi.

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang secara resmi diumumkan awal Maret mulai akan dirasakan dampaknya pada perekonomian pada triwulan II. Penerapan *physical distancing* menyebabkan sebagian besar proses produksi terhenti. Hal ini berakibat pada turunnya produksi, inflasi, dan PHK. Di sisi *supply*, daya beli masyarakat akan turun karena bertambahnya pengangguran (PHK/ kesulitan berjualan). Tidak seperti krisis moneter 98, sektor informal/UMKM tidak dapat lagi dijadikan bantalan ekonomi karena ketiadan pasar. Pemulihan ekonomi membutuhkan peran sentral pemerintah untuk menggerakan proses produksi bersamaan dengan memulihkan daya beli masyarakat.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL

Pendapatan Negara

TOTAL

487,44 miliar Rp	671,80 miliar Rp	500,73 miliar Rp
TW I 2020	TW I 2019	TW I 2018

Penerimaan Perpajakan

- 15,4% — TW I Tahun 2020 Rp 404,02 miliar
- 22,8% — TW I Tahun 2019 Rp 499,98 miliar
- 21,9% — TW I Tahun 2018 Rp 349,71 miliar

PNBP

- 11,4% — TW I Tahun 2020 Rp 83,42 miliar
- 38,6% — TW I Tahun 2019 Rp 171,82 miliar
- 45,9% — TW I Tahun 2018 Rp 151,02 miliar

Belanja Negara

TOTAL

4,66 triliun Rp	5,19 triliun Rp	4,78 triliun Rp
TW I 2020	TW I 2019	TW I 2018

Belanja Pegawai

TW I Tahun 2020 = Rp 435,09 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 397,45 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 355,16 miliar

Belanja Barang

TW I Tahun 2020 = Rp 290,21 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 374,79 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 279,19 miliar

Belanja Modal

TW I Tahun 2020 = Rp 121,64 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 200,35 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 205,95 miliar

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

TW I Tahun 2020 = Rp 3,81 triliun
TW I Tahun 2019 = Rp 4,21 triliun
TW I Tahun 2018 = Rp 3,94 triliun

Belanja Bansos

TW I Tahun 2020 = Rp 5 juta
TW I Tahun 2019 = Rp 810 juta
TW I Tahun 2018 = Rp 2,5 juta

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Berikut disajikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Sultra dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2. 1
Pagu dan Realisasi APBN lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.924,15**	**500,73**	**2.636,23**	**671,80**	**3.355,64**	**487,44**
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	**1.924,15**	**500,73**	**2.636,23**	**671,80**	**3.355,64**	**487,44**
1. Penerimaan Perpajakan	1.594,94	349,71	2.190,84	499,98	2.621,32	404,02
2. PNBP	329,21	151,02	445,39	171,82	734,32	83,42
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	**22.729,08**	**4.780,28**	**24.263,99**	**5.187,21**	**25.139,03**	**4.657,40**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6.859,06	840,29	7.006,63	973,40	7.459,52	846,95
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	15.870,02	3.939,98	17.257,36	4.213,81	17.679,51	3.810,45
C. SURPLUS/DEFISIT (A - B)	**(20.804,94)**	**(4.279,54)**	**(21.627,76)**	**(4.515,40)**	**(21.783,39)**	**(4.169,96)**

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan Simtrada-DJPK (diolah)

APBN lingkup Sultra dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, baik dari sisi target pendapatan maupun alokasi belanja negara. Pendapatan negara lingkup Sultra dalam APBN tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp3,36 triliun atau 27,29% lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2019, sedangkan alokasi belanja negara mencapai Rp25,14 triliun atau 3,61% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Realisasi pendapatan negara lingkup Sultra sampai dengan triwulan I 2020 Rp487,44 miliar atau 14,53% dari target, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp4,66 triliun atau 18,53% dari alokasi. Dengan demikian, sampai dengan triwulan I 2020 APBN di Sultra mencatatkan defisit sebesar Rp4,17 triliun.

2.1 Pendapatan Negara

Sampai dengan triwulan I 2020 pendapatan negara lingkup Sultra menurun sebesar 27,44% (*YoY*) dari Rp671,80 miliar pada triwulan I 2019 menjadi Rp487,45 miliar. Adapun sumber pendapatan masih didominasi penerimaan perpajakan yang mencapai 82,88% dari seluruh realisasi pendapatan negara lingkup Sultra.

2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan lingkup Sultra sampai dengan triwulan I 2020 tercatat Rp404,02 miliar atau 15,41% dari target sebesar Rp2,62 triliun, menurun 19,19% (*YoY*) dari Rp499,98 miliar pada triwulan I 2019.

Grafik 2. 1
Realisasi Perpajakan Triwulan I 2020 (miliar Rp.)

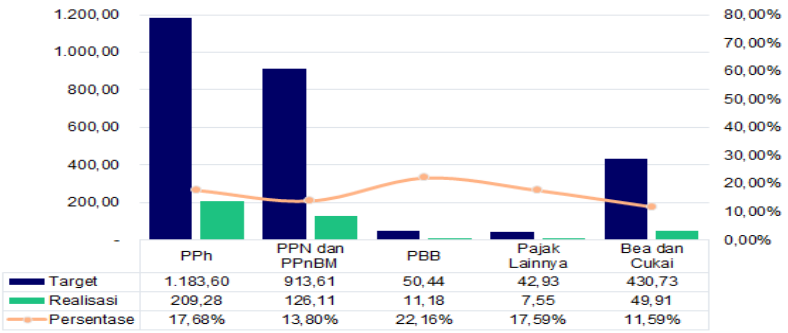

	PPh	PPN dan PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	Bea dan Cukai
Target	1.183,60	913,61	50,44	42,93	430,73
Realisasi	209,28	126,11	11,18	7,55	49,91
Persentase	17,68%	13,80%	22,16%	17,59%	11,59%

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

Meskipun penerimaan perpajakan di Sultra triwulan I 2020 mengalami penurunan di tengah pendemi COVID-19, tetapi Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan sebesar 1,80% (YoY) menjadi Rp209,28 miliar dari Rp205,58 miliar pada triwulan I 2019. Sementara itu Penerimaan PPN mencapai Rp125,84 miliar menurun 19,90% (YoY) dari Rp157,11 miliar pada triwulan I 2019. Adapun Penerimaan PPnBM mencapai Rp274,35 juta mengalami pertumbuhan sebesar 167,43% (YoY) dari Rp102,59 juta pada triwulan I 2019.

Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp49,91 miliar menurun 59,76% (YoY) dari Rp124,03 miliar pada triwulan I 2019. Menurunnya aktivitas ekspor impor akibat merebaknya wabah COVID-19 menekan penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar. Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp49,77 miliar, sedangkan Bea Keluar belum mencatatkan penerimaan. Sementara itu, penerimaan Cukai meski meningkat menjadi Rp139,9 juta tidak dapat menutupi agregat penurunan penerimaan Bea dan Cukai lingkup Sultra.

2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi PNBP lingkup Sultra mencapai Rp83,42 miliar atau 11,36% dari target PNBP. Capaian ini menurun 51,44% (YoY) dari Rp171,82 miliar pada triwulan I 2019.

a) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Grafik 2. 2
Realisasi PNBP Triwulan I 2020 (miliar Rp.)

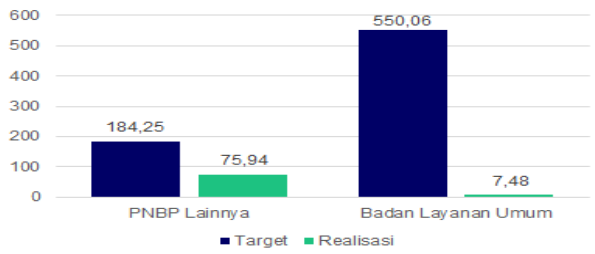

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

Pendapatan BLU lingkup Sultra sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp7,48 miliar atau 1,36% dari target pendapatan BLU. Menurun Rp87,61 miliar dibandingkan triwulan I 2019. Penurunan ini disebabkan belum adanya realisasi pendapatan jasa

layanan pendidikan pada Universitas Halu Oleo. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rumkit Bhayangkara Kendari mendominasi pendapatan BLU sebesar Rp7,44 miliar atau 99,49% dari seluruh pendapatan BLU, sedangkan sisanya merupakan pendapatan jasa layanan perbankan BLU dan Pendapatan Lain-lain BLU.

b) Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP lainnya sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp75,94 miliar atau 41,22% dari target pendapatan PNBP Lainnya menurun 0,97% dibandingkan triwulan I 2019. Pendapatan Jasa Sektor Perhubungan menjadi kontributor terbesar PNBP Lainnya dengan realisasi mencapai Rp25,09 miliar atau 33,03%, diikuti Pendapatan Biaya Pendidikan Rp20,20 miliar atau 26,60% dan Pendapatan Layanan Kepolisian sebesar Rp14,58 miliar atau 19,20%.

2.2 BELANJA NEGARA

Pagu belanja negara lingkup Sultra tahun anggaran 2020 sebesar Rp25,14 triliun, meningkat 3,61% dibandingkan pagu tahun anggaran 2019 sebesar Rp24,26 triliun. Akan tetapi dari sisi kinerja, persentase realisasi sampai dengan triwulan I 2020 sebesar 18,53% mengalami penurunan 2,85% (YoY) dari 21,38% pada triwulan I 2019. Jika dilihat berdasarkan fungsi sebagaimana **Lampiran 2**, maka pagu terbesar adalah fungsi ekonomi yang mencapai Rp2,78 triliun atau 37,81%.

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat K/L

Grafik 2. 3
Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat K/L Triwulan I 2020 (miliar Rp.)

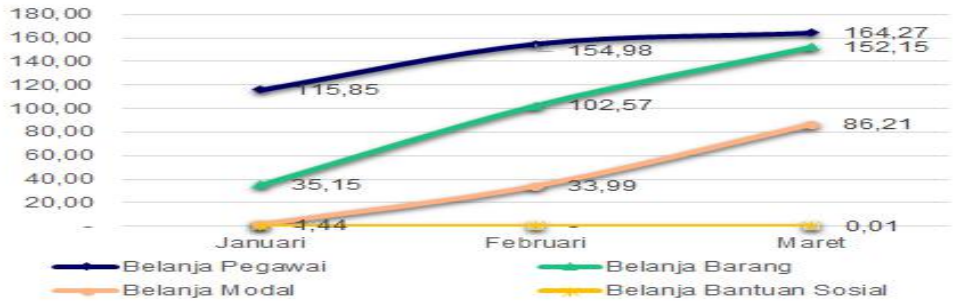

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

Realisasi belanja pemerintah pusat K/L sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp846,95 miliar atau 11,35% dari alokasi anggaran dan masih di bawah target realisasi nasional sebesar 15%. Persentase realisasi tertinggi pada belanja pegawai mencapai 19,09%, diikuti belanja barang sebesar 10,49%. Sedangkan realisasi belanja modal baru mencapai 5,10%. Penundaan berbagai kegiatan sebagai dampak pandemi COVID-19, sangat mempengaruhi serapan anggaran pada triwulan I 2020.

2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi TKDD lingkup Sultra sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp3,81 triliun atau 21,55% dari alokasi TKDD sebesar Rp17,68 triliun. Persentase realisasi TKDD terbesar adalah realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai 30,51%, disusul realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 19,00%. Sementara itu, Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum ada realisasi. Adapun daerah dengan realisasi TKDD terbesar adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp743,67 miliar atau 19,52% dari total realisasi.

Grafik 2. 4
Realisasi TKDD Triwulan I 2020 (miliar Rp.)

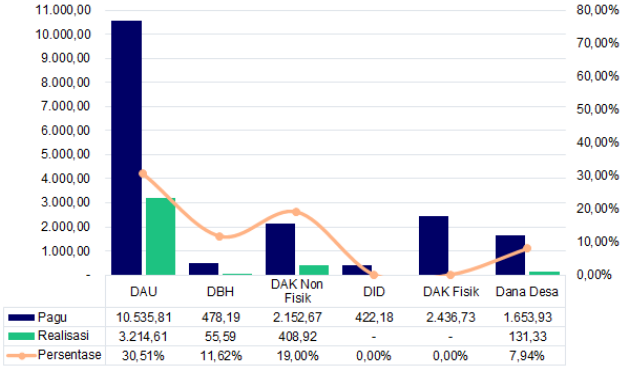

	DAU	DBH	DAK Non Fisik	DID	DAK Fisik	Dana Desa
Pagu	10.535,81	478,19	2.152,67	422,18	2.436,73	1.653,93
Realisasi	3.214,61	55,59	408,92	-	-	131,33
Persentase	30,51%	11,62%	19,00%	0,00%	0,00%	7,94%

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan Simtrada-DJPK (diolah)

Alokasi DAK Fisik lingkup Sultra tahun 2020 sebesar Rp2,44 triliun dan sampai dengan triwulan I 2020 belum tercatat adanya penyaluran. Penyaluran DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir baru dilaksanakan mulai bulan April. Adapun alokasi Dana Desa lingkup Sultra tahun 2020 sebesar Rp1,63 triliun, penyaluran sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp131,33 miliar atau 7,94%. Pada tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami perubahan dengan penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa.

2.2.3 Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Sultra saat ini memiliki 2 entitas BLU, yaitu Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang ditetapkan sebagai BLU penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 (Rumpun Pendidikan-Layanan Pendidikan PTN), sementara Rumah Sakit Umum (RSU) Bhayangkara Kendari ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2016 tanggal 13 Januari 2016 (Rumpun Kesehatan-Layanan Kesehatan).

a) Perkembangan Pengelolaan Aset

Perkembangan Ekuitas BLU lingkup Sultra tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel berikut menunjukkan bahwa Ekuitas UHO Kendari dalam 3 (tiga) tahun terakhir fluktuatif, pada triwulan I 2020 nilai ekuitas UHO Kendari mencapai Rp2,39 triliun menurun 4,33% jika dibandingkan tahun 2019. Nilai aset tetap mengalami penurunan 1,73% jika dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar Rp2,26 triliun. Penurunan nilai Kas Lainnya dan Setara Kas, Aset Gedung dan

Tabel 2. 2
Ekuitas BLU lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	UHO			RS BHAYANGKARA		
	2018	2019	2020 *)	2018	2019	2020 *)
Aset Lancar	107,38	174,43	103,14	10,41	8,32	14,47
Aset Tetap	2.322,44	2.325,84	2.285,59	39,00	39,53	60,84
Aset Lainnya	2,41	2,41	2,23	0,18	0,41	0,52
Kewajiban	1,50	1,95	1,30	0,09	0,03	0,05
Ekuitas	2.430,74	2.497,73	2.389,66	49,50	48,24	75,78

Sumber: LK BLU UHO dan RS Bhayangkara (diolah)
*) Data LK *Unaudited* 2019

Bangunan, serta Akumulasi Penyusutan menjadi kontributor menurunnya ekuitas UHO Kendari.

Ekuitas RSU Bhayangkara Kendari dalam 3 tahun terakhir juga fluktuatif, pada tahun 2020 nilai ekuitas RSU Bhayangkara Kendari sebesar Rp75,78 triliun meningkat 57,08% jika dibandingkan periode tahun 2019. Sementara nilai aset tetap periode 2020 meningkat 53,90% jika dibandingkan periode tahun 2019 menjadi Rp60,84 triliun. Kenaikan nilai Kas pada BLU, Aset Peralatan dan Mesin, dan Aset Lain-lain memberi kontribusi yang signifikan, meskipun di sisi lain nilai Akumulasi Penyusutan juga meningkat (**Tabel 2.2**).

b) Kemandirian Fiskal

Salah satu tujuan diberikannya status BLU adalah untuk "mewiraswastakan" pemerintah (*enterprising the government*). Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM).

Porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) UHO dalam 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Porsi RM tahun 2020 sebesar 47,72%, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 dengan rerata sebesar 46,65%.

Perkembangan porsi RM RSU Bhayangkara Kendari meski masih fluktuatif, akan tetapi menunjukkan tingkat kemandirian BLU tersebut dalam 3 tahun terakhir sangat baik. Hal ini tercermin dari porsi RM tahun 2020 yang sebesar 14,13%, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 dengan rerata sebesar 13,31%.

Tabel 2. 3
Pagu RM dan PNBP BLU lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	UHO			RS BHAYANGKARA		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pagu PNBP	251,97	265,00	244,73	28,59	30,05	26,52
Pagu RM	220,35	221,88	223,43	4,40	4,28	4,36
Total Pagu	472,32	486,88	468,17	32,99	34,33	30,89
% Pagu RM	**46,65%**	**45,57%**	**47,72%**	**13,32%**	**12,47%**	**14,13%**

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

2.2.4 Manajemen Investasi Pusat

Kanwil DJPb diberikan tugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan mengkoordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi *Outstanding* Pinjaman yang dilaksanakan bulan Januari 2020, penerusan pinjaman pada Kabupaten Konawe telah lunas dan saat ini menunggu Surat Penutupan Perjanjian Penerusan Pinjaman.

Tabel 2. 4
Penyaluran KUR per Skema lingkup Sultra

Skema	Debitur	Penyaluran (dalam rupiah)	*Outstanding* (dalam rupiah)	Rata-rata per Debitur (dalam rupiah)
KECIL	1.361	218.297.900.000	208.177.096.988	160.395.224
MIKRO	14.669	407.779.600.000	392.273.336.677	27.798.732
TKI	2	29.060.000	24.216.666	14.530.000
UMI	140	1.077.000.000		7.692.857
Total	**16.172**	**627.183.560.000**	**600.474.650.331**	**38.782.065**

Sumber: SIKP-DJPb (diolah)

Sementara itu, penyaluran KUR dan UMi lingkup Sultra tahun 2020 (*data SIKP 14 April 2020*) mencapai Rp672,18 miliar yang disalurkan kepada 16.172 debitur. Penyaluran KUR dengan Skema Mikro mencapai 90,71% **(Tabel 2.4).** Berdasarkan data pada **Lampiran 3**, debitur terbanyak berada di Kab. Kolaka yaitu 2.727 debitur atau 16,86% dengan nilai penyaluran mencapai Rp107,71 miliar, sekaligus merupakan nilai penyaluran KUR terbesar lingkup Sultra. Penyaluran KUR Sektor Produksi mencapai Rp345,80 miliar atau 55,14% dari total penyaluran, dengan jumlah debitur sebanyak 10.141 debitur atau 62,71%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan penyaluran minimal 60% pada sektor Produksi. Sedangkan, penyaluran UMi lingkup Sultra telah mencapai Rp1,08 miliar kepada 140 debitur pada 12 (dua belas) kabupaten/kota. Penyaluran UMi dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Pegadaian.

2.3 PROGNOSIS REALISASI APBN

Prognosis realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh, termasuk di antaranya efek dari pandemi COVID-19, dan tren dalam beberapa tahun terakhir, maka sampai dengan akhir triwulan IV 2020 pendapatan negara di Sultra diperkirakan akan tercapai 97,81% dan belanja negara akan terealisasi sebesar 96,73%.

Tabel 2. 5
Prognosis Realisasi APBN lingkup Sultra tahun 2020

Uraian	Pagu (miliar)	s.d. Triwulan I		s.d. Triwulan IV	
		Realisasi (miliar)	% Realisasi	Prognosis (miliar)	% Prognosis
Pendapatan Negara	3.355,64	487,44	14,53%	3.282,15	97,81%
Belanja Negara	25.139,03	4.657,40	18,53%	24.316,98	96,73%
Surplus/Defisit	(21.783,39)	(4.169,96)		(21.034,83)	

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

PELAKSANAAN APBD

Pendapatan Negara

Total Pendapatan

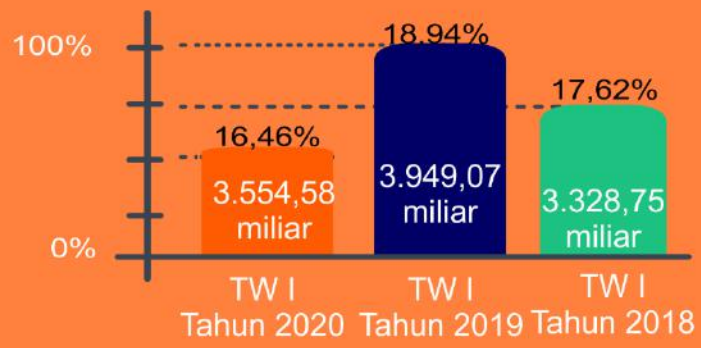

PAD
TW I Tahun 2020 = Rp 122,99 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 202,34 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 74,01 miliar

Pendapatan Transfer
TW I Tahun 2020 = Rp 3.430,59 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 3.682,73 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 3.216,34 miliar

Lain-lain Pend. Daerah yang Sah
TW I Tahun 2020 = Rp 1,00 miliar
TW I Tahun 2019 = Rp 64,00 miliar
TW I Tahun 2018 = Rp 38,40 miliar

Belanja Negara

Total Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Modal

Belanja Barang

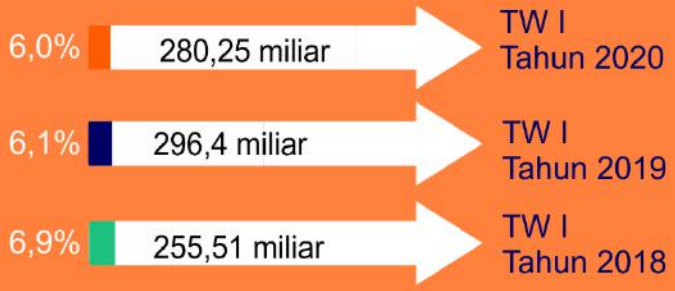

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Hibah

BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Pemerintah Daerah lingkup Sultra terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, dan 15 Pemerintah Kabupaten. Realisasi pendapatan maupun belanja dan transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Sultra sampai dengan triwulan I 2020 secara agregat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hampir semua komponen pendapatan dan belanja mengalami penurunan.

Tabel 3. 1
Pagu dan Realisasi APBD s.d Triwulan I 2019 dan 2020 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp.)

URAIAN	2019		2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.277,89**	**202,34**	**2.599,43**	**122,99**
Pendapatan Pajak Daerah	1.048,41	99,66	1.427,20	61,64
Hasil Retribusi Daerah	237,11	15,95	208,94	19,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146,62	0,08	155,74	3,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	845,75	86,65	807,55	38,29
PENDAPATAN TRANSFER	**17.631,36**	**3.682,73**	**17.853,54**	**3.430,59**
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	807,87	136,44	478,19	55,69
Dana Alokasi Umum	10.282,66	2.995,37	10.526,14	3.111,49
Dana Alokasi Khusus	3.615,44	223,42	4.508,00	176,15
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.405,49	256,30	1.850,14	78,76
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	516,52	71,20	485,1	8,34
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	3,38	0,00	5,97	0,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**946,13**	**64,00**	**1.138,73**	**1,00**
Pendapatan Hibah	497,66	0,00	586,89	0,00
Pendapatan Lainnya	448,47	64,00	551,84	1,00
JUMLAH PENDAPATAN	**20.855,38**	**3.949,07**	**21.591,70**	**3.554,58**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**10.855,07**	**1.447,71**	**11.878,47**	**1.328,93**
Belanja Pegawai	7.195,20	1.093,03	7.770,39	1.067,22
Belanja Bunga	22,45	9,48	78,69	6,91
Belanja Subsidi	0,37	0,03	0,30	0,012
Belanja Hibah	670,56	24,45	1.037,70	127,37
Belanja Bantuan Sosial	31,82	3,19	20,42	0,009
Belanja Bagi Hasil kepada Prov / Kab /Kota dan PemDes	420,48	92,64	482,65	13,26
Belanja Bantuan Keu kpd Prov / Kab/ Kota dan PemDes	2.466,71	222,90	2.417,71	106,56
Belanja Tidak Terduga	47,48	1,99	70,61	7,59
BELANJA LANGSUNG	**11.171,04**	**400,74**	**11.663,77**	**381,78**
Belanja Barang dan Jasa	4.833,63	296,4	4.672,52	280,25
Belanja Modal	6.337,41	104,34	6.991,25	101,53
JUMLAH BELANJA	**22.026,11**	**1.848,45**	**23.542,24**	**1.710,71**
SURPLUS/DERSIT	**(1.170,73)**	**2.100,62**	**(1.950,54)**	**1.843,87**
Penerimaan Pembiayaan	1.602,27	103,08	2.246,50	14,74
Pengeluaran Pembiayaan	394,02	77,01	287,58	119,89

Sumber Data: LRA Pemda, GFS Kanwil DJPb Prov. Sultra (diolah)

3.1 Pendapatan Daerah

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah lingkup Sultra dirinci sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp61,64 miliar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I 2019. penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19 atau Corona yang melanda hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak ekonomi. Penerimaan pajak daerah tertinggi ada pada Pemerintah Kota Kendari yaitu sebesar

Rp28,13 miliar, dan terendah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dimana sampai triwulan I 2020 belum terdapat realisasi.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan I 2020 yaitu sebesar Rp19,77 miliar, meningkat jika dibandingkan triwulan I 2019. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan penerimaan retribusi terbanyak sebesar Rp4,21 miliar. Sedangkan yang terkecil adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp46 juta.

Grafik 3. 1
Target dan Realisasi per Jenis PAD s.d Triwulan I 2020 Seluruh Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah)

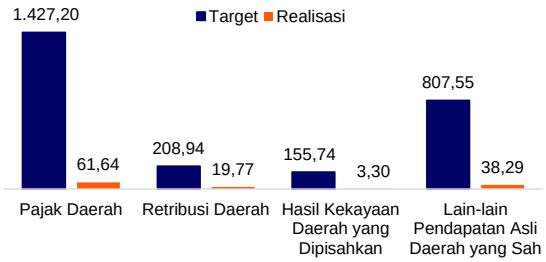

Sumber: BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

c) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan triwulan I 2020 yaitu sebesar Rp3,29 miliar, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan I 2019. Hal ini disebabkan pemerintah daerah pada triwulan I 2020 ini sudah mulai menerima atau membukuan deviden yang diterima dari BUMD atau perusahaan daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada triwulan I 2020 sebesar Rp38,29 miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih semakin inovatif menggali sumber pendapatan lain yang berasal dari selain pajak daerah dan restribusi daerah.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sampai dengan triwulan I 2020 lingkup Sultra mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2019. Hal ini dikarenakan belum adanya realisasi dana transfer Dana Alokasi Khusus pada triwulan I 2020. Selain itu, realisasi dana transfer Dana Desa mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2019. Adanya skema penyaluran baru melalui rekening kas desa yang semestinya dapat mempercepat proses realisasi nampaknya mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan Peraturan Desa (PerDes) mengenai APBDes. Pemerintah Daerah yang

memperoleh pendapatan transfer terbesar yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp560,98 miliar, sedangkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pendapatan transfer terkecil yaitu Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp93,26 miliar. Rasio Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 96,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Grafik 3. 2
Realisasi Pendapatan Transfer s.d Triwulan I Tahun 2020 Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah)

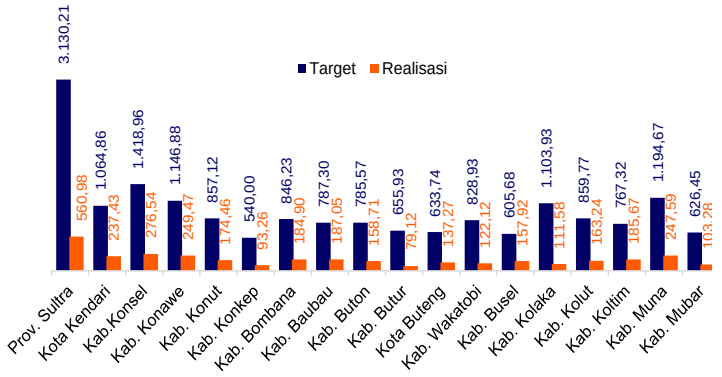

Sumber: BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan triwulan I 2020 hanya mencapai Rp1,00 miliar menurun jauh jika dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 64,00 miliar.

Grafik 3. 3
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d Triwulan I 2020 (miliar rupiah)

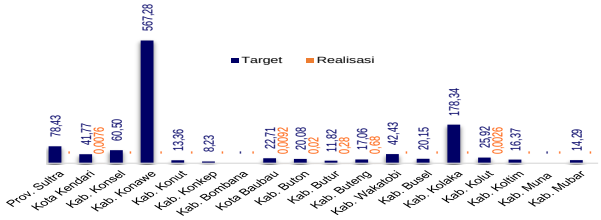

Sumber: BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

3.2 Belanja Daerah

3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

Sampai dengan triwulan I 2020 Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1,07 triliun, sedangkan Belanja Barang terealisasi sebesar Rp280,25 miliar dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp101,53 miliar. Masih kecilnya realisasi belanja modal disebabkan banyak kontrak pengadaan yang belum atau masih dalam tahap lelang. Tren dalam

Grafik 3. 4
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal s.d Triwulan I 2020 Lingkup Provinsi Sultra (miliar rupiah)

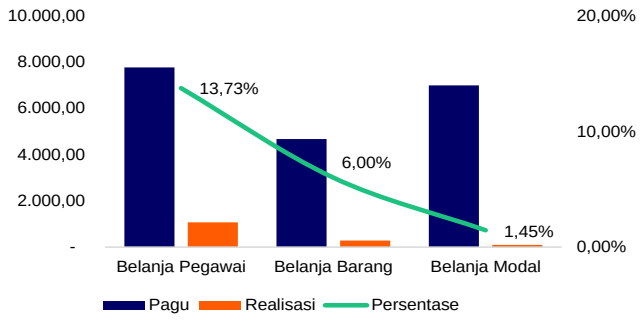

Sumber: BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

beberapa tahun terakhir realisasi belanja modal akan mengalami peningkatan pada triwulan IV.

3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pagu belanja daerah terbesar berdasarkan klasifikasi urusan adalah Ekonomi yaitu sebesar Rp4,75 triliun. Persentase realisasi belanja tertinggi adalah urusan Kesehatan yaitu sebesar 7,66%. Sedangkan persentase realisasi belanja terkecil adalah urusan Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 6,24%. Tingginya realisasi urusan Kesehatan merupakan pengaruh dari penanganan pandemi COVID-19 yang merubah alokasi dan pola belanja urusan Kesehatan.

Grafik 3. 5
Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Urusan s.d Triwulan I 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah)

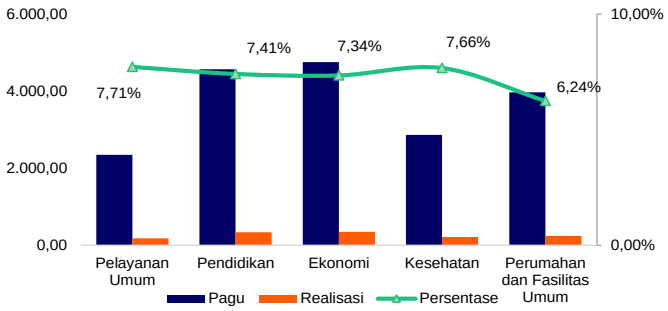

Sumber: SIKD, BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

3.3 PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2020

Prognosis realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2020 setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh dan *analisis trend* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV 2020 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi			
		Triwulan I		Prognosis s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	21.591,70	3.554,58	16,46%	20.350,18	94,25%
Belanja Daerah	23.542,24	1.710,70	7,27%	22.551,11	95,79%
Surplus/Defisit	**- 1.950,54**			**- 2.200,93**	

Sumber: BPKAD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

Hingga akhir tahun 2020 diperkirakan pendapatan daerah lingkup Sulawesi Tenggara akan tercapai 94,25%. Sementara itu, belanja daerah akan terealisasi sebesar 95,79%. Total pendapatan daerah hingga akhir periode triwulan I 2019 mencapai 16,46% dari target penerimaan, sedangkan realisasi belanja sebesar 7,27%. Tren yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan menjelang akhir tahun 2020 atau pada triwulan IV 2020.

BAB IV

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

KONSOLIDASIAN

Pajak	465,66 miliar	-28,83%
PNBP	106,49 miliar	-76,19%

Belanja Pemerintah

-2,81%

2.437,84 miliar

Belanja Transfer

-51,17%

460,38 miliar

BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

4.1 ANALISIS PROPORSI DAN PERBANDINGAN

Dalam rangka mewujudkan kondisi kinerja perekonomian yang ideal, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai sasarannya. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui alokasi anggaran yang tertuang dalam APBN dan APBD. Gabungan data/informasi keuangan APBN yang ada dalam LKPP dan APBD yang ada dalam LKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK).

Realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian triwulan I 2020 setelah dilakukan eliminasi transaksi akun resiprokal mengalami penurunan defisit sebesar 3,18% (YoY) dari Rp2.414,78 miliar pada triwulan I 2019 menjadi Rp2.326,08 miliar. Dari sisi pendapatan konsolidasian terjadi penurunan 37,64% (YoY) dibandingkan pada triwulan I 2020 menjadi sebesar Rp572,14 miliar, demikian juga sisi belanja konsolidasian menurun 10,49% (YoY) dari Rp3.202,28 miliar menjadi Rp2.898,22 miliar.

Tabel 4. 1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2020				2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasian	Kenaikan	Konsolidasian
Pendapatan Negara	**487,44**	**3.541,33**	**572,14**	**-37,64%**	**787,50**
Pendapatan Perpajakan	404,02	61,64	465,66	-28,83%	599,89
Pendapatan Bukan Pajak*)	83,42	57,60	106,49	-76,19%	187,61
Hibah	-	-	-	-	-
Transfer*)	-	3.422,09	-	-	-
Belanja Negara	**4.657,40**	**1.697,45**	**2.898,22**	**-10,49%**	**3.202,28**
Belanja Pemerintah	846,95	1.590,89	2.437,84	-2,81%	2.506,31
Transfer*)	3.810,45	106,56	460,38	-51,17%	695,97
Surplus/(Defisit)	**(4.169,96)**	**1.843,88**	**(2.326,08)**	**-3,81%**	**(2.414,78)**
Pembiayaan	**-**	**(105,15)**	**(105,15)**	**124,79%**	**26,07**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	14,74	14,74	-599,36%	103,08
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	119,89	119,89	35,76%	77,01
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**(4.169,96)**	**1.738,72**	**(2.431,23)**	**1,75%**	**(2.388,71)**

*) Jumlah Konsolidasian setelah dilakukan eliminasi atas akun resiprokal

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi pendapatan, hibah dan transfer konsolidasian tingkat wilayah mencapai Rp572,14 miliar yang terdiri atas Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp487,44 miliar dan Pemerintah Daerah

sebesar Rp 84,70 miliar, setelah eliminasi atas transaksi akun resiprokal sebesar Rp 3.456,63 miliar. Selama 2 tahun terakhir pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan perpajakan. Pada periode pelaporan, pendapatan perpajakan mencapai Rp465,66 miliar atau 81,39% sedangkan PNBP sebesar Rp 106,49 miliar atau18,61% (seluruh pendapatan transfer telah dilakukan eliminasi).

Grafik 4. 1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020

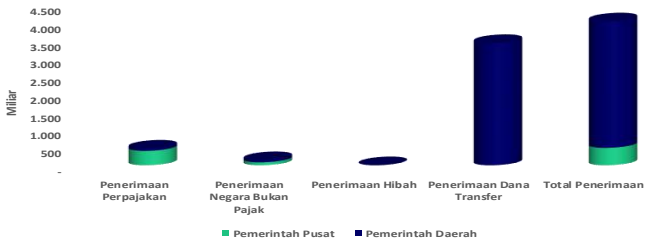

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Grafik 4. 2
Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

4.2.2 Analisis Perubahan

Grafik 4. 3
Perbandingan Pendapatan Perpajakan konsolidasian

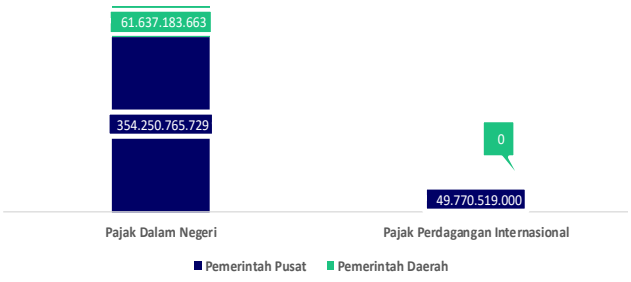

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Realiasi pendapatan perpajakan konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2020 mencapai Rp 465,66 miliar menurun sebesar 22,38% dari triwulan I 2019. Penurunan pendapatan perpajakan konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara ditandai dengan penurunan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 12,60% sementara pajak perdagangan internasional turun sebesar 59,87%. Penurunan tersebut akibat kondisi ekonomi yang melemah sebagai pandemic COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia saat ini tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara.

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2020 atas dasar harga berlaku mencapai Rp31,55 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,37% melambat dibanding triwulan I-2019 sebesar 6,39%. Sementara itu, pada periode yang sama, realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat turun 27,35% menjadi Rp572,14 miliar. Capaian-capaian tersebut menunjukan bahwa penurunan pendapatan konsolidasian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan konsolidasian.

Tabel 4. 2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019		2020	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	599.887.436.667	54,84%	465.658.468.392	-22,38%
PNBP	187.613.528.271	99,23%	106.485.033.982	-43,24%
Total	787.500.964.938	63,52%	572.143.502.374	-27,35%
PDRB	29,58 T	9,50%	31,55 T	6,66%

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

4.3 BELANJA KONSOLIDASIAN

4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4. 4
Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja

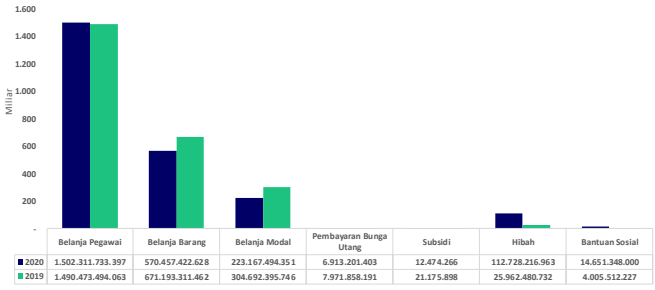

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Realisasi Belanja Pemerintah Konsolidasian pada triwulan I 2020 (di luar Dana Transfer) Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp2.437,84 miliar. Belanja tersebut didominasi belanja operasi sebesar 90,53% sementara belanja modal hanya sebesar 9,15%.

4.3.2 Analisis Perubahan

Realisasi belanja pemerintah konsolidasian pada triwulan I 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan jika dibanding triwulan I 2019. Hal ini karena pada triwulan I 2020 dan berlanjut hingga kini terjadi

Grafik 4. 5
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020

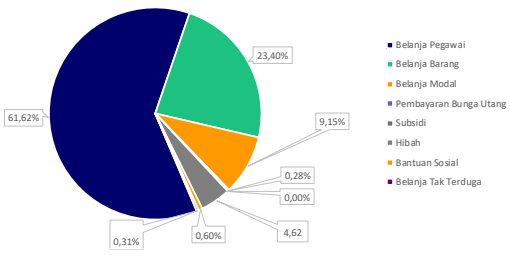

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara yang berakibat pada pembatasan kegiatan, penghematan belanja K/L dan *refocusing* dan realokasi anggaran internal K/L untuk mempercepat penangan COVID-19. Selain berfokus pada penanganan Kesehatan, prioritas anggaran lainnya adalah pemberian bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal ini berakibat pada peningkatan realisasi belanja bantuan sosial dan biaya tak terduga. Belanja bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 265,78% menjadi Rp 14,65 miliar sementara belanja tak terduga meningkat sebesar 281,92% menjadi Rp7,60 miliar. Selain itu belanja pegawai dan hibah juga mengalami kenaikan realiasasi. Belanja pegawai meningkat sebesar 0,79% dan belanja hibah meningkat sebesar 334,20%.

Grafik 4. 6
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2019

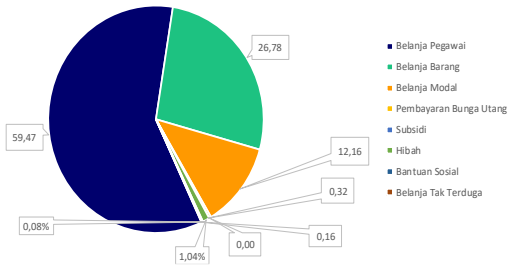

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2020 tumbuh 4,37%, melambat dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran Provinsi Sulawesi Tenggara triwulan I 2020 naik menjadi 3,17% dari sebelumnya 2,96%. Kebijkan fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan saling mempengaruhi. Aktifitas ekonomi menentukan besarnya penerimaan pajak, sementara belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi menyebabkan penurunan penerimaan pajak mencapai 22,38%. Disisi belanja, turunnya realisasi belanja barang sebesar 15,01% dan turunnya realisasi belanja modal sebesar 26,76% menyebabkan kontraksi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PDRB menurut pengeluaran) sebesar 0,09% dan pertumbuhan PMTB turun 1,42% dibanding triwulan I 2019. Turunnya realisasi belanja modal memiliki pengaruh lebih besar karena berdampak pada perekonomian jangka panjang.

4.4 ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluran yaitu:

$$Y = C + I + G + (X-M),$$

dimana

Y	:	Pendapatan Nasional	I	:	Investasi	X	:	Ekspor
C	:	Konsumsi Rumah Tangga	G	:	Pengeluaran Pemerintah	M	:	Impor

Untuk mengetahui kontribusi pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari belanja dapat dilakukan dengan membandingkan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah dengan PDRB, sementara dari investasi dapat dilakukan dengan membandingkan PMTB dengan PDRB.

Tabel 4. 3
Ringkasan LO Pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2020

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
	Pendapatan	**5.313.093.959.998**
a.	Pajak	465.658.468.392
b.	Kontribusi Sosial	-
c.	Hibah	44.265.221.208
d.	Pendapatan Lainnya	4.803.170.270.398
	Beban	**2.758.609.124.519**
a.	Kompensasi Pegawai	1.502.675.243.397
b.	Penggunaan Barang dan Jasa	565.043.240.163
c.	Konsumsi Aset Tetap	-
d.	Bunga	6.913.201.403
e.	Subsidi	12.474.266
f.	Hibah	656.666.194.825
g.	Manfaat Sosial	14.651.348.000
h.	Beban Lainnya	12.647.422.465
	Keseimbangan Operasi Bruto/Netto	**2.554.484.835.479**
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN NETTO:		**223.167.494.351**
a.	Aset Tetap	206.756.406.691
b.	Perubahan Persediaan	-
c.	Barang Berharga	-
d.	Aset Non Produksi	16.411.087.660
	Net Lending / Borrowing	**2.331.317.341.128**
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
a.	**Akuisisi Neto Aset Keuangan**	**2.226.624.977.551**
-	Dalam Negeri	2.226.624.977.551
-	Luar Negeri	-
-	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	-
b.	**Keterjadian Kewajiban Neto**	**(104.692.363.577)**
-	Dalam Negeri	(104.692.363.577)
-	Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Triwulan I 2020 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan **Tabel 4.3** dapat diketahui bahwa nilai belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (G) mencapai Rp2.082,37 miliar dan investasi pemerintah (I) mencapai Rp 206,76 miliar. Dengan demikian kontribusi pemerintah dari belanja terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,60% sedangkan kontribusi pemerintah dari investasi terhadap PDRB sebesar 0,66%.

Mengingat kondisi ekonomi yang melambat pada triwulan I akibat adanya pandemi COVID-19, maka kontribusi pemerintah dari sisi belanja sangat dibutuhkan. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk dapat menggerakkan perekonomian. Penanganan pandemi COVID-19 baik dari dimensi Kesehatan maupun ekonomi merupakan tanggungjawab bersama. Pemeritah daerah perlu bertanggungjawab untuk dapat mensinergikan seluruh sumber daya yang ada untuk menangani pandemi COVID-19 dan mengurangi dampaknya bagi perekonomian.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

BAB V

BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

BERITA / ISU FISKAL REGIONAL

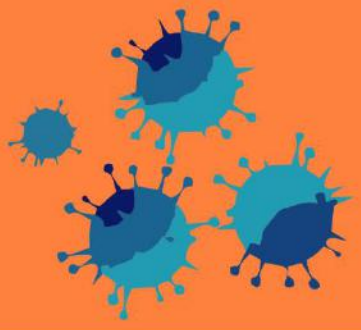

Kinerja Fiskal di Tengah Pandemi COVID-19

WHO menetapkan status global pandemic 11 Maret 2020

↓

Berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,3% sd -0,4%

↓

Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Kinerja Fiskal di Sultra

Penurunan realisasi belanja APBN
TW I 2020: 9,39%
TW I 2019: 11,21%

Penurunan realisasi Dana Desa
TW I 2020: 8%
TW I 2019: 18%

Stimulus Fiskal

Tambahan Se-Indonesia 405,1 Triliun

150 TRILIUN
Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah

75 TRILIUN
Untuk Bidang Kesehatan

110 TRILIUN
Untuk Perlindungan Sosial

70,1 TRILIUN
Untuk Insentif Perpajakan dan Stimulus Kredit Usaha Rakyat

Transformasi UMKM Menuju Teknologi Digital

UMKM Indonesia 2019
60 juta unit
kontribusi PDRB 62,58%
Penyerapan TK 96,99%

UMKM Sultra 2016
279.421 unit
Penyerapan TK:
661.729 orang

9,6 juta pelaku UMKM memanfaatkan *platform online*
16%

Akses Pembiayaan:
KUR Kecil 218,83 miliar (1.363 debitur)
KUR Mikro 413,80 miliar (14.856 debitur)
UMi 1,08 miliar (140 debitur)

Mapping kebijakan:
- *raising awareness*
- *expert support*
- *financial support*
- *collaboration environments*

BAB V
BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

5.1 Kinerja Fiskal di Tengah Pandemi COVID-19

World Health Organization (WHO) menetapkan status *global pandemic* untuk *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pada 11 Maret 2020. Beberapa negara sudah mengkonfirmasi kasus positif COVID-19 dan korban meninggal yang ditimbulkan, salah satunya adalah Indonesia. Tidak saja berpengaruh pada aspek kesehatan, pandemi COVID-19 berpengaruh juga pada perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,3% sampai dengan -0,4%. Transmisi pengaruh pandemi ini melalui meningkatnya PHK, penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat, terganggunya UMKM, terganggunya aktifitas ekonomi terutama sektor manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi. Dampak yang dirasakan pada sektor riil akan merambat pada sektor keuangan. COVID-19 mempengaruhi volatilitas pasar saham, surat berharga, depresiasi Rupiah, peningkatan *Non Performing Loan,* persoalan likuiditas dan *insolvency.*

Dari sisi fiskal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah telah menetapkan beberapan kebijakan stimulus fiskal. Melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020, Presiden menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

Untuk mencegah keparahan dan krisis ekonomi dan keuangan, pemerintah menambah belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp75 triliun, tambahan jaring pengaman sosial sebesar Rp110

triliun, dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun dan dukungan pembiayaan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun (**Tabel 5.1**).

Kebijakan fiskal tidak saja diterapkan di tingkat nasional tetapi juga diterapkan di tingkat daerah. Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian alokasi di daerah dan realokasi transfer untuk penanganan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DD Tahun Anggaran 2020, KMK nomor 6 tahun 2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan BOK dalam rangka Pencegahan dan/atau Penangan COVID-19, PMK 35/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 5. 1
Tambahan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19

Uraian	Jumlah
A. Kesehatan	75,00
1. Intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran BPJS	75,00
a. Subsidi iuran penyesuian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019	3,00
b. Insentif tenaga medis pusat dan daerah	5,90
Tenaga medis pusat: 1,3 T	
Tenaga medis daerah: 4,6T	
c. Santunan Kematian untuk tenaga kesehatan	0,30
d. Belanja penanganan kesehatan untuk COVID-19	65,80
B. *Social Safety Net*	110,00
1. Tambahan Jaringan Pengaman Sosial	65,00
a. Penambahan penyaluran PKH untuk 10 juta KPM	8,30
b. Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (15,2 --> 20 juta)	10,90
c. Tambahan Kartu Pra Kerja	10,00
d. Diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA	3,50
e. Tambahan insentif perumahan bagi MBR	1,50
f. Program jaringan pengaman sosial lainnya	30,80
2. Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik	25,00
3. Penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID-19	20,00
C. Dukungan Industri	70,10
1. Cadangan Perpajakan/DTP lainnya	64,00
a. Pajak ditanggung pemerintah untuk PPh Psl. 21 dan PPN	52,00
b. Bea Masuk DTP	12,00
2. Stimulus KUR	6,10
D. Dukungan Industri	150,00
1. Pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional	150,00
Total Tambahan Anggaran	405,10

Sumber: *Press Coference* Menteri Keuangan, 1 April 2020

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 telah meminta Pemda untuk melakukan percepatan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dana atau revisi anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk mendorong realokasi APBD, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 119.2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 yang mengatur refocusing dan realokasi APBD. Dalam ketentuan tersebut, Pemda diminta untuk melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal minimal 50% selain rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya. Hasil rasionalisasi tersebut digunakan untuk pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi di daerah. Penanganan pandemi COVID-19 merupakan tanggungjawab bersama sehingga pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah dalam penanganan pandemi tersebut melalui pemberian sanksi.

Pemerintah pusat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH bagi Pemda yang belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD atau penyesuian APBD belum sesuai ketentuan SKB dimaksud.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada **Tabel 5.2**, sejumlah Pemda di Sultra telah melaporkan *refocusing* APBD untuk penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan data sangat sementara yang berhasil dikumpulkan, total anggaran penanganan COVID-19 oleh 4 Pemda sebesar Rp147,6 miliar yang dialokasikan dalam 3 prioritas belanja yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan ekonomi serta jaring pengaman sosial. Bila dilihat dari sumber pembiayaannya, anggaran penangan COVID-19 bergantung pada transfer pemerintah pusat. Sehingga, apabila Pemda tidak melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan, maka sanksi yang diberikan akan berdampak kemampuan Pemda untuk membiayai belanjanya termasuk belanja dalam rangka penanganan COVID-19.

Tabel 5. 2
Anggaran Penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara*

Prioritas	Pemerintah Daerah			
	Kolaka	Muna	Konawe Selatan	Konawe Utara
Penanganan Kesehatan	15.000.000.000,00	8.829.750.000,00	35.824.459.425,00	24.580.067.600,00
Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi	5.000.000.000,00	4.129.890.000,00	4.540.936.000,00	34.656.317.650,00
Social Safety Net	10.000.000.000,00	1.630.000.000,00	2.800.000.000,00	649.800.000,00
Total Anggaran	30.000.000.000,00	14.589.640.000,00	43.165.395.425,00	59.886.185.250,00

Sumber: Laporan Pemda Kepada Mendagri
* data sangat sementara

Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah belum efektif berlaku di triwulan I 2020. Namun demikian, dampak pandemik COVID-19 secara global telah dirasakan imbasnya pada keuangan negara.

Grafik 5. 1
Perbandingan Persentase Realisasi Kumulatif Harian Belanja APBN Tahun 2019 dan 2020

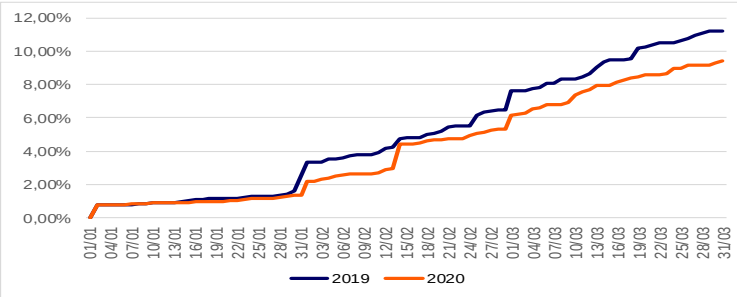

Sumber: OMSPAN (diolah)

Perkembangan belanja pemerintah (APBN) di Sultra pada triwulan I 2020 mengalami penurunan dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Penurunan ini mulai berlangsung pada pertengahan bulan Januari terlihat pada **Grafik 5.1**. Meskipun kasus COVID-19 pada triwulan I belum massif terjadi di Sultra, kinerja belanja APBN di Sultra telah mengalami penurunan. Realisasi kumulatif belanja APBN pada **Grafik 5.1** yang terdiri atas belanja kementerian negara/lembaga dan transfer ke daerah dan dana desa yang

dilakukan oleh KPPN menunjukkan penurunan. Pada triwulan I 2020, persentase realisasi belanja APBN mencapai 9,39%, lebih kecil dibanding realisasi belanja triwulan I 2019 yang mencapai 11,21%.

Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada kinerja penyaluran Dana Desa. Pada triwulan I 2020 persentase penyaluran Dana Desa hanya mencapai 8% sedangkan triwulan I 2019 mencapai 18% (**Grafik 5.2**). Kebijakan baru yang diterapkan dalam penyaluran Dana Desa secara langsung ke rekening milik desa nampaknya belum mampu mempercepat penyaluran Dana Desa di Sultra. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pemenuhan persyaratan Dana Desa Tahap I yaitu Peraturan Desa (PerDes) mengenai APBDes.

Grafik 5. 2
Perbandingan Persentase Realisasi Kumulatif Harian Dana Desa Tahap I Tahun 2019 dan 2020

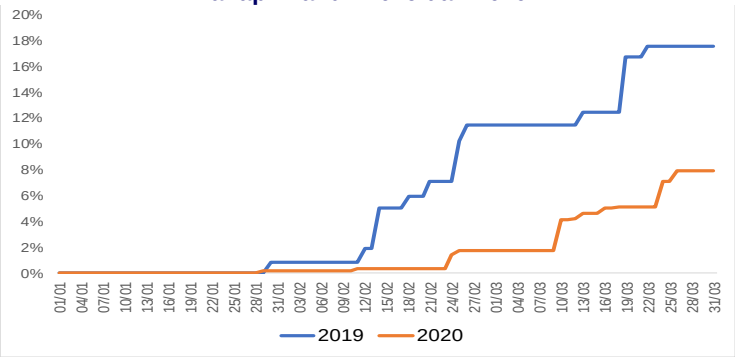

Sumber: OMSPAN (diolah)

Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN, penyaluran APBN pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebesar 147,32 miliar rupiah dibandingkan triwulan I 2019. Penurunan terbesar di lingkup Sultra terdapat pada KPPN Baubau yaitu sebesar 63,33 miliar rupiah sedangkan penurunan terendah terdapat pada KPPN Kolaka yaitu turun sebesar 20,79 miliar rupiah (**Tabel 5.3**).

Tabel 5. 3
Perbandingan Penyaluran APBN Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2020 Berdasarkan KPPN

KPPN	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih
BAUBAU	199.212.479.550	135.880.741.804	(63.331.737.746)
KENDARI	875.289.485.536	837.201.083.355	(38.088.402.181)
KOLAKA	148.625.528.316	127.838.998.327	(20.786.529.989)
RAHA	67.412.446.825	42.297.792.667	(25.114.654.158)
Total	**1.290.539.940.227**	**1.143.218.616.153**	**(147.321.324.074)**

Sumber: OMSPAN (diolah)

Penyaluran dan pembayaran belanja APBN terkait COVID-19 belum sepenuhnya berjalan di triwulan I. Pembayaran terkait COVID-19 baru dilakukan di akhir bulan Maret oleh satker Kementerian/Lembaga sejumlah 15,44 miliar rupiah. Dampak pandemi COVID-19 pada tren penyaluran APBN, diperkirakan baru akan dirasakan pada triwulan II 2020. Pandemi COVID-19 merupakan momentum untuk menggugah kesadaran Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas program pembangunan dan kualitas belanja daerah.

5.1 Transformasi UMKM Menuju Teknologi Digital

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai negara. Sejalan dengan itu, strategi pelaksanaan pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam lima prioritas nasional, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. Kebijakan pengembangan potensi daerah melalui pengembangan UMKM pada dasarnya untuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang selaras dengan paradigma baru pembangunan.

Daerah memiliki banyak potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga berpotensi melahirkan produk-produk unggulan. Sultra memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang melimpah antara lain kakao/coklat, jambu mete, penangkapan ikan tuna/cakalang, emas, nikel dan masih banyak lagi. Selain itu, Sultra memiliki keindahan alam, yang menarik untuk dijadikan obyek tempat wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi lahirnya UMKM di Sultra sangat besar jika dilihat dari potensi sumber daya yang dimilikinya. Jumlah UMK di Sultra menurut Sensus Ekonomi BPS 2016 sebanyak 279.421 usaha dan mampu menampung tenaga kerja sebanyak 661.729 orang. Dalam mendukung UMKM di Indonesia, Pemerintah meluncurkan program pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Adapun jumlah debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan di Sultra dapat dilihat pada **Tabel 5.4** berikut:

Jumlah debitur keseluruhan yang mendapatkan pembiayaan KUR dan UMi adalah 16.170 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar 627,16 miliar rupiah. Jumlah debitur terbanyak adalah skema KUR Mikro yaitu 14.669 debitur.

Tabel 5. 4
Pembiayaan KUR dan UMi Triwulan I 2020

Skema	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran
KUR Kecil	1.361	218.297.900.000
KUR Mikro	14.669	407.779.600.000
UMi	140	1.077.000.000
Total	**16.170**	**627.154.500.000**

Sumber: SIKP (diolah)

UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, tidak terkecuali di Sultra. Faktor penyebab ketertinggalan UMKM di Indonesia diantaranya ketertinggalan dalam hal mutu, inovasi produk dan rendahnya pemanfaatan teknologi (Tambunan, 2010). Saat ini, dunia mengalami perubahan yang memberikan efek besar yang dikatakan sebagai revolusi industri 4.0 dengan salah satu inovasinya yaitu *Internet of Things* (IoT). UMKM di Indonesia pada akhir tahun 2019 berkontribusi 62,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan penyerapan tenaga kerja 96,99 persen dengan

jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Dari jumlah tersebut sekitar 9,6 juta pelaku UMKM (16 persen) telah memanfaatkan *platform* online untuk memasarkan produknya (Kominfo, 2020). Menurut riset dari *Deloitte Access Economics* (2015), Indonesia akan mencapai status negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025 jika dapat mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi digital khususnya UKM. Melalui pemasaran produk melalui digital berpotensi memperoleh kenaikan pendapatan secara signifikan hingga 80 persen dan menjadi 17 kali lipat lebih inovatif. UMKM sudah semestinya beradaptasi dengan kondisi ekonomi digital untuk mengetahui karakteristik konsumen dan memasarkan produknya sehingga mampu secara cepat memenuhi kebutuhan pasar.

World Economic Forum melakukan *mapping* kebijakan dalam menghadapi tantangan UMKM pada revolusi industri 4.0 antara lain *raising awareness*, *expert support*, *financial support*, dan *collaboration environments*. Dari kebijakan tersebut dengan melihat kondisi UMKM di Sultra diperoleh bagan sebagai berikut:

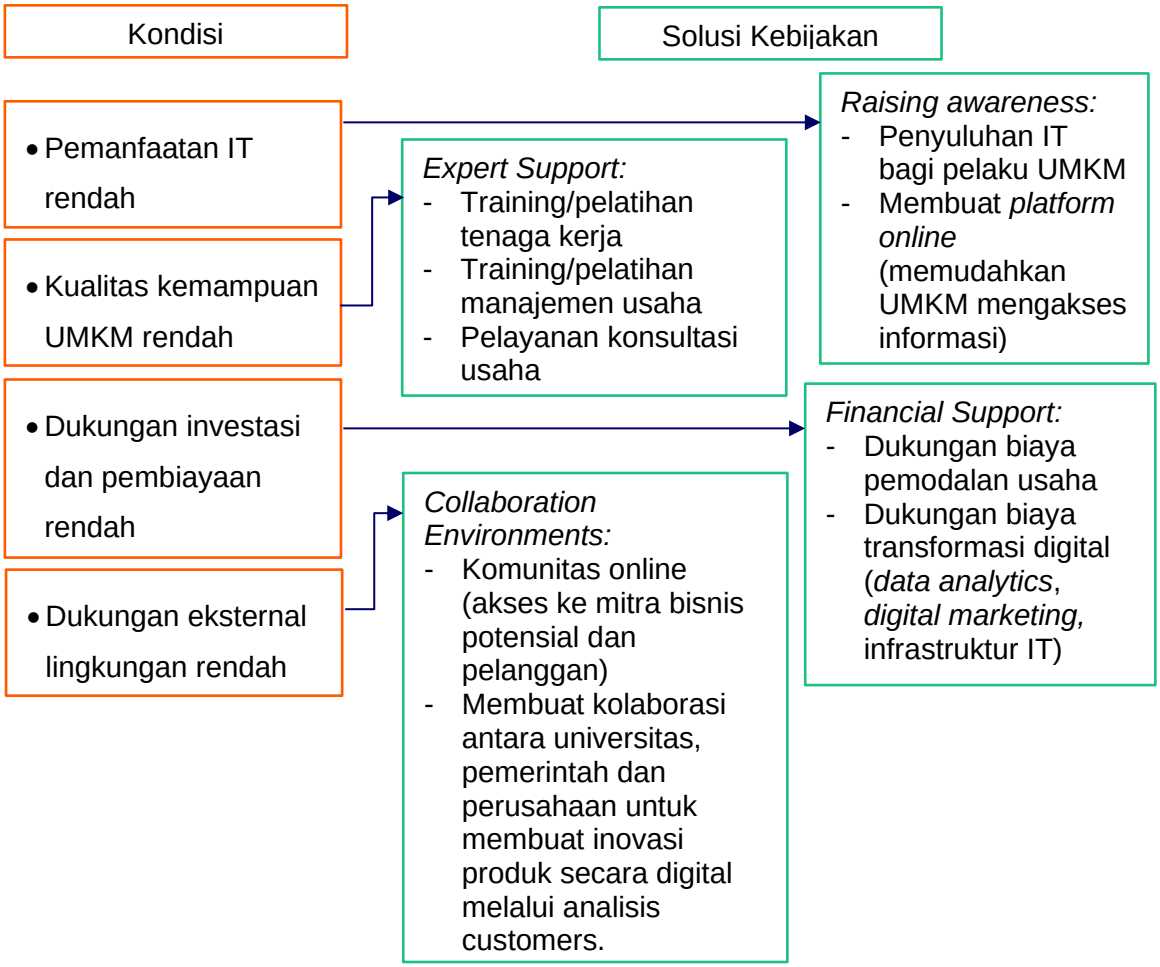

LAMPIRAN

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INFLASI DI WILAYAH SULAWESI

Perbandingan Indeks dan Inflasi Maret 2020
Kota-Kota di Pulau Sulawesi (2018 =100)

	Kota	Maret IHK	Maret Inflasi (%)
1	Manado	104,86	-0,90
2	Kotamobagu	104,47	0,25
3	Luwuk	106,26	-0,59
4	Palu	105,16	-0,35
5	Bulukumba	105,34	0,15
6	Watampone	103,10	0,02
7	Makassar	104,42	-0,11
8	Pare-pare	103,72	-0,10
9	Palopo	103,32	-0,09
10	Kendari	103,15	0,06
11	Baubau	102,26	0,06
12	Gorontalo	103,81	-0,13
13	Mamuju	103,67	0,62

LAMPIRAN 2 REALISASI APBN LINGKUP SULTRA PER FUNGSI DI LUAR TKDD

Realisasi APBN lingkup Sultra per Fungsi di luar TKDD (rupiah)

No.	Fungsi	Pagu	Realisasi	Persentase
1	PELAYANAN UMUM	482.680.706.000	67.138.172.240	13,91%
2	PERTAHANAN	340.611.280.000	69.669.308.441	20,45%
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.255.033.004.000	238.511.561.911	19,00%
4	EKONOMI	2.777.038.915.000	189.570.201.554	6,83%
5	LINGKUNGAN HIDUP	345.475.633.000	38.571.790.928	11,16%
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	350.035.740.000	43.536.276.305	12,44%
7	KESEHATAN	151.071.068.000	19.397.742.718	12,84%
8	PARIWISATA DAN BUDAYA	2.491.996.000	-	0,00%
9	AGAMA	226.663.679.000	30.578.811.582	13,49%
10	PENDIDIKAN	1.364.136.374.000	147.253.375.110	10,79%
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	48.530.865.000	2.372.312.484	4,89%
	Total	**7.343.769.260.000**	**846.599.553.273**	**11,53%**

LAMPIRAN 3 PENYALURAN KUR DAN UMI LINGKUP SULTRA

Penyaluran KUR lingkup Sultra per Sektor (rupiah)

No.	Sektor Usaha	Debitur	Penyaluran	*Outstanding*	Rerata per Debitur
1	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	5.282	166.924.200.000	163.439.299.071	31.602.461
2	PERIKANAN	1.662	46.954.000.000	44.461.530.378	28.251.504
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.354	50.808.900.000	48.670.111.684	37.525.037
4	KONSTRUKSI	4	151.000.000	150.166.700	37.750.000
5	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	5.891	280.302.800.000	265.855.156.776	47.581.531
6	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	643	30.933.900.000	29.816.175.924	48.108.709
7	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	189	8.988.000.000	8.560.961.505	47.555.556
8	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	73	6.431.530.000	6.337.268.440	88.103.151
9	JASA PENDIDIKAN	1	25.000.000	23.958.350	25.000.000
10	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	16	660.000.000	632.577.902	41.250.000
11	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	917	33.927.230.000	32.527.443.601	36.998.070
	Total	**16.032**	**626.106.560.000**	**600.474.650.331**	**39.053.553**

Penyaluran UMi lingkup Sultra per Wilayah (rupiah)

No.	Wilayah	Debitur	Penyaluran	*Outstanding*	Rerata per Debitur
1	Kab. Kolaka	19	153.000.000	-	8.052.632
2	Kab. Konawe	9	74.000.000	-	8.222.222
3	Kab. Muna	17	129.000.000	-	7.588.235
4	Kab. Buton	4	29.000.000	-	7.250.000
5	Kab. Konawe Selatan	5	37.000.000	-	7.400.000
6	Kab. Bombana	3	26.000.000	-	8.666.667
7	Kab. Wakatobi	5	40.000.000	-	8.000.000
8	Kab. Kolaka Utara	12	93.500.000	-	7.791.667
9	Kab. Konawe Utara	1	8.000.000	-	8.000.000
10	Kab. Buton Utara	6	55.000.000	-	9.166.667
11	Kota Kendari	35	274.000.000	-	7.828.571
12	Kota Bau-Bau	24	158.500.000	-	6.604.167
	Total	**140**	**1.077.000.000**	**-**	**7.692.857**

Penyaluran KUR lingkup Sultra per Wilayah (rupiah)

No.	Wilayah	Debitur	Penyaluran	*Outstanding*	Rerata per Debitur
1	Kab. Kolaka	2.708	107.553.530.000	103.820.599.506	39.716.961
2	Kab. Konawe	1.454	50.460.530.000	48.904.092.853	34.704.629
3	Kab. Muna	2.513	79.953.000.000	76.455.348.205	31.815.758
4	Kab. Buton	1.862	68.518.000.000	65.158.045.928	36.798.067
5	Kab. Konawe Selatan	1.613	58.171.500.000	55.672.375.234	36.064.166
6	Kab. Bombana	870	37.537.000.000	36.607.154.331	43.145.977
7	Kab. Wakatobi	587	20.064.000.000	18.764.411.346	34.180.579
8	Kab. Kolaka Utara	1.278	46.813.000.000	45.760.188.107	36.629.890
9	Kab. Konawe Utara	53	2.235.000.000	2.156.826.439	42.169.811
10	Kab. Buton Utara	290	10.193.000.000	9.625.583.140	35.148.276
11	Kab. Kolaka Timur	26	3.493.000.000	3.362.348.660	134.346.154
12	Kab. Muna Barat	3	750.000.000	739.831.224	250.000.000
13	Kab. Buton Tengah	1	500.000.000	490.757.485	500.000.000
14	Kab. Buton Selatan	1	150.000.000	147.227.245	150.000.000
15	Kota Kendari	1.559	88.887.000.000	84.230.135.039	57.015.394
16	Kota Bau-Bau	1.214	50.828.000.000	48.579.725.589	41.868.204
	Total	**16.032**	**626.106.560.000**	**600.474.650.331**	**39.053.553**

Penyaluran UMi lingkup Sultra per Sektor (rupiah)

No.	Sektor Usaha	Debitur	Penyaluran	*Outstanding*	Rerata per Debitur
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	140	1.077.000.000	-	7.692.857
	Total	**140**	**1.077.000.000**	**-**	**7.692.857**

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

Deloitte.2015. UKM pemicu kemajuan Indonesia instrumen pertumbuhan nusantara [online] tersedia pada https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/finance]. diakses pada:[23 April 2020].

Kominfo. 2020. Bangun Infrastruktur TIK, dorong pertumbuhan *e-commerce*. [internet] tersedia pada [https://www.kominfo.go.id/content/detail/24502/bangun-infrastruktur-tik-dorong-pertumbuhan-e-commerce/0/berita_satker]. diakses pada:[4 Mei 2020].

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan BOK dalam rangka Pencegahan dan/atau Penangan COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.7/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DD Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 35/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Press Conference Manteri Keuangan. 2020. Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi COVID-19.

Tambunan TH.2010. Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia.Jakarta [ID], Salemba Empat.

World Economic Forum.2020. *Accelerating the Impact of Industrial IoT in Small and Medium-Sized Enterprises: A Protocol for Action* [internet] tersedia pada [http://www3.weforum.org/docs]. diakses pada:[29 April 2020]

www.sultra.bps.go.id

FOTO SAMPUL

1. Jembatan Teluk Kendari – Kota Kendari

   Sumber:

   Firdan Fahmi - Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Masjid Al Alam Kendari – Kota Kendari

   Sumber:

   Firdan Fahmi - Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Tugu Religi – Kota Kendari

   Sumber:

   Le Petra Wicaksono - Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34 Kendari
Telepon (0401) 3127191, Faksimili (0401) 3127119
Email: djpbnsultra@kemenkeu.go.id
Situs: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra